



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 27 Januari 2015

Halaman: 1

Bangunan Tutupi Benteng Ditertibkan

JOGJA — Penegakan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY nomor 13/2012 terprogram dengan prioritas di bidang kebudayaan. Lamban tapi pasti, eksistensi Keraton Yogyakarta sebagai simbol kebudayaan mulai terasa. Itu ditunjukkan dengan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja membersihkan bangunan yang menutupi benteng Keraton.

Dalam hal ini Pemkot Jogja sebagian tugas melakukan sosialisasi kepada warga. "Kami sudah sosialisasikan perlahan (pembelian bangunan warga). Kami ingin Benteng Keraton ini biar tampak," ujar Wakilkota Jogja Haryadi saat berkunjung di Kepatihan, Senin (26/1).

Menurut Haryadi selama ini pandangan benteng keraton terepos dari sisi selatan.

Padahal, pagar benteng itu melingkar dari berbagai penjuru. "Ya pelan-pelan, bertahap. Sekarang kami juga masih mendata berapa kebutuhan anggaran semuanya (untuk membeli bangunan yang menutupi benteng keraton)," ujarnya.

Penertiban zona bersih di lingkungan depan benteng ini sebagai program penataan kawasan keraton termasuk njeron benteng sekaligus penataan Kawasan Cagar Budaya (KCB) Keraton. "Karena memang merupakan kawasan cagar budaya," kata mantan Wakil Walikota pendamping Wakilkota Herry Zudianto periode 2006-2011 itu.

Bangunan benteng dari sisi timur dan

KEHAL 7

Bangunan Tutupi

Sambungan dari halaman 1

Yogyakarta di lima bidang. Di samping bidang kebudayaan, empat bidang lainnya yaitu pengisian jabatan gubernur dan wagub, Kelembagaan, Tata Ruang dan Pertanian.

Terpisah, upaya pembersihan tersebut mendapat perhatian serius dari Masyarakat Advokasi Warisan Kebudayaan (Madya) DIY. Ormas peduli kebudayaan itu, mengingatkan pentingnya mempertimbangkan akar dan perubahan sejarah keraton sebelum mengeksekusi rencana pembersihan tersebut.

"Ada tiga hal yang harus jadi pertimbangan, yaitu menyangkut kepentingan pelestarian budaya, kepentingan keraton serta kepentingan masyarakat," ujar Koordinator Madya DIY, Joe Marbun.

Menurutnya, pelestarian warisan budaya tidak bisa dilakukan secara parsial dengan hanya melihat kondisi terkini. Namun, pergantian kepemimpinan keraton dari masa ke masa harus diperhatikan.

"Seperti zaman Sri Sultan HB IX mulai muncul permukiman warga di njeron benteng. Maksud saya harus melihat bagaimana proses perkembangan sejarah di dalam keraton tampak," katanya.

Pelestarian warisan budaya diharapkan jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat. Namun satu sisi ekistensi keraton juga tetap terjaga. "Karena itu tidak semua bangunan harus dipindahkan," katanya.

Dia pun mengapresiasi jika saat ini sedang diusulkan ke UNESCO bahwa Keraton Yogyakarta sebagai salah satu warisan budaya dunia. "Ini sebagai tonggak baru," tandasnya. (age)

Yogyakarta,
Kepala
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			

Yogyakarta, 04 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005